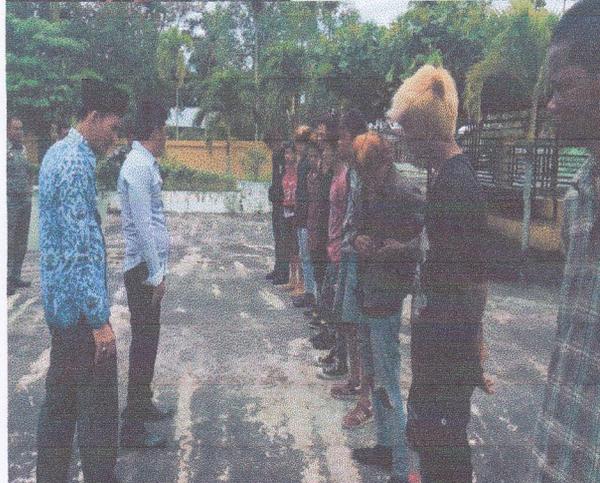




LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017



JL. ANTARA BENGKALIS
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2017 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2018

**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS**



**Dra. Hj. MARTINI, MH
Pembina Tk. I
NIP.19630306 199403 2 002**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial ;
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial ;
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2017 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017, pada OPD Dinas Sosial terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2017.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Sosial telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja semuanya sudah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Sosial merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Sosial serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2018, Dinas Sosial berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2017. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial ;
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial ;
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terbagi dalam suatu struktur organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari;

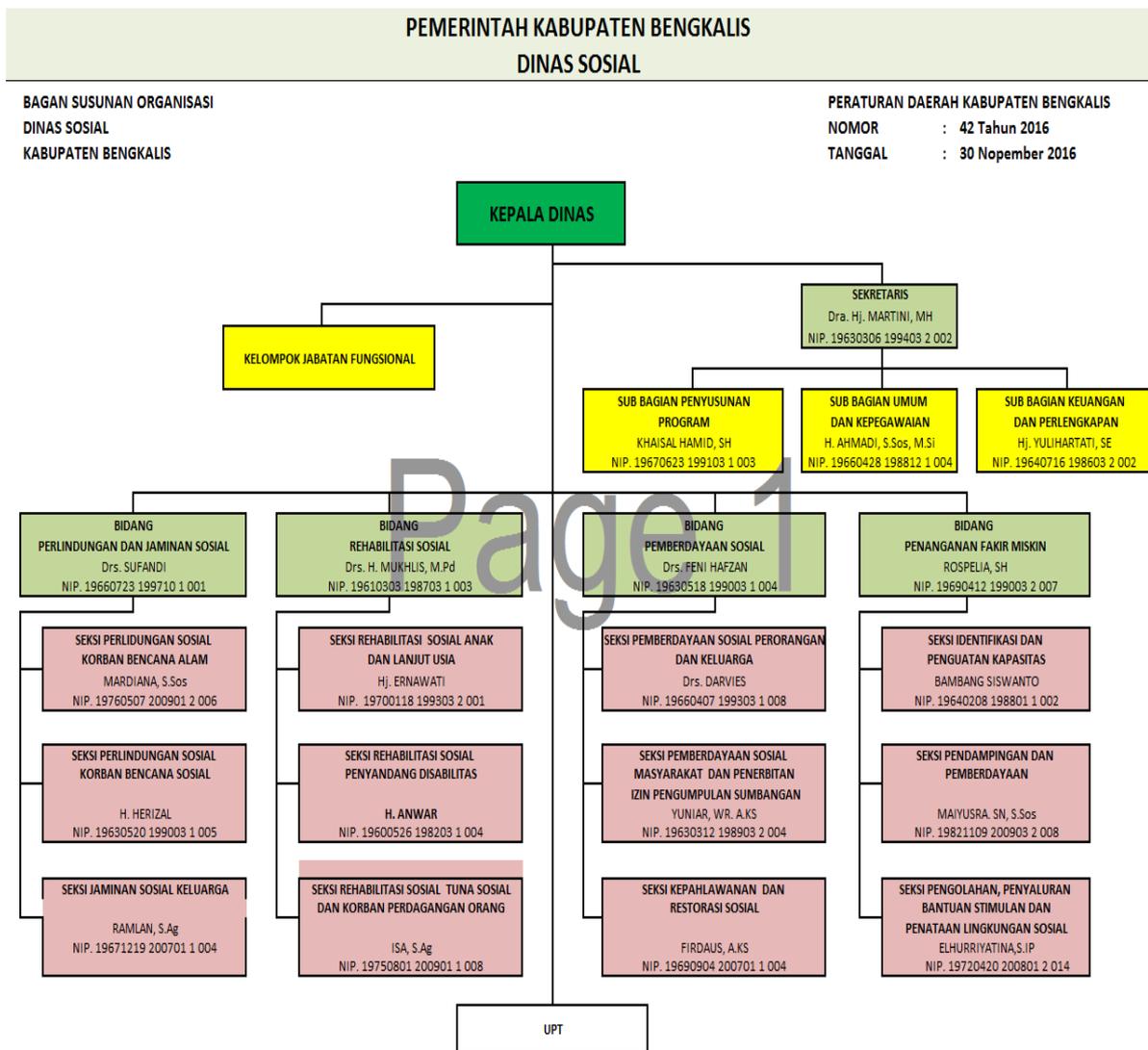
- 1. Kepala Dinas ;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbag Penyusunan Program
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
- 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari;
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- 4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari;
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- 5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari;
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial, Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan; dan
 - c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- 6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari;
 - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Pengolahan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

Sosial

- 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran secara umum Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai serta sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Sosial tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2017.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

No	Sasaran	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Meningkatnya kualitas jaminan dan perlindungan sosial PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan dan perlindungan sosial	50%	52%	69%	70%	71%
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS	Persentase PMKS yang terlayani dan direhabilitasi sosial	39%	69%	70%	71%	72%
2	Meningkatnya peran aktif PSKS dan kelembagaan sosial dalam penanganan PMKS	Persentase PSKS dan Kelembagaan Sosial yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	A
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas jaminan dan perlindungan sosial PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan dan perlindungan sosial	50%
Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS	Persentase PMKS yang terlayani dan direhabilitasi sosial	39%
Meningkatnya peran aktif PSKS dan kelembagaan sosial dalam penanganan PMKS	Persentase PSKS dan Kelembagaan Sosial yang aktif	100%
Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2017. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas jaminan dan perlindungan sosial PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan dan perlindungan sosial	50%	47%	94%
Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS	Persentase PMKS yang terlayani dan direhabilitasi sosial	39%	39%	100%
Meningkatnya peran aktif PSKS dan kelembagaan sosial dalam penanganan PMKS	Persentase PSKS dan Kelembagaan Sosial yang aktif	100%	97%	97%
Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan	100%		

B. Analisis Kinerja

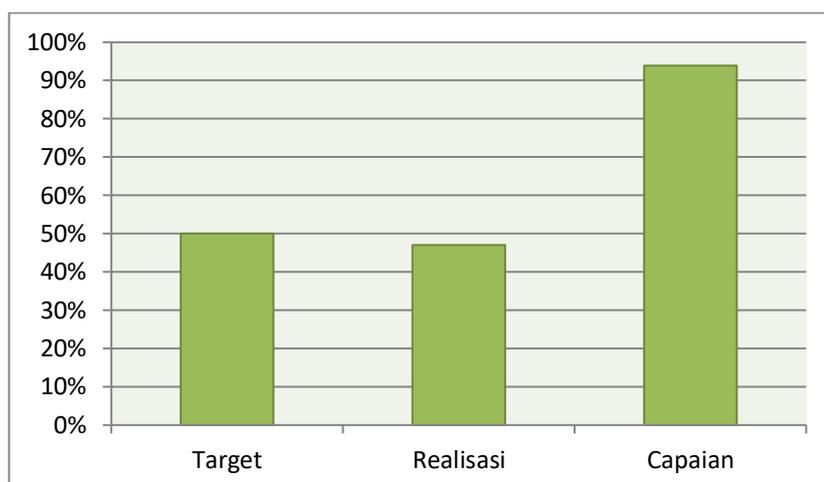
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Sosial telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas jaminan dan perlindungan sosial PMKS

Indikator	2016	2017		Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	
Persentase PMKS yang memperoleh jaminan dan perlindungan sosial	44%	50%	47%	94%
Rata-rata Capaian				

Grafik



Permasalahan/Hambatan

Pada indikator ini untuk perlindungan bagi orang terlantar perkiraan OT yang akan dipulangkan sebanyak 100 Orang namun pada tahun 2017 OT yang ada dikabupaten Bengkalis dan telah dipulangkan hanya ada 70 Orang karena permasalahan orang terlantar merupakan permasalahan yang kondisional, dengan demikian Jumlah OT dalam satu tahun tidak dapat ditetapkan jumlah real nya.

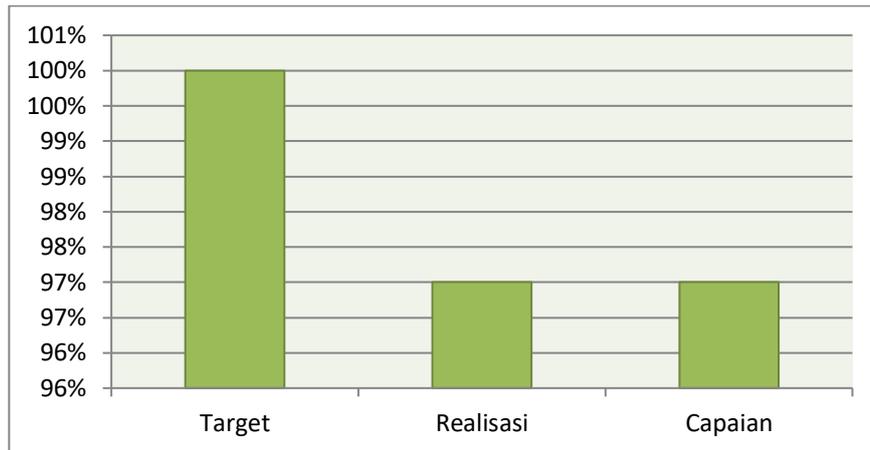
Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Karena mayoritas dari OT adalah Eks Narapidana maka solusinya agar tercapai Sasaran kinerja maka Dinas Sosial harus Bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk mengetahui jumlah Narapidana yang akan dibebaskan dan dipulangkan ke daerah asal dalam satu tahun anggaran.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS

Indikator	2016	2017		Capaian 2017 thdp 2021	
	Capaian	Target	Realisasi		Capaian
Persentase PMKS yang terlayani dan direhabilitasi sosial	38%	39%	39%	100%	54%
Rata-rata Capaian					

Grafik



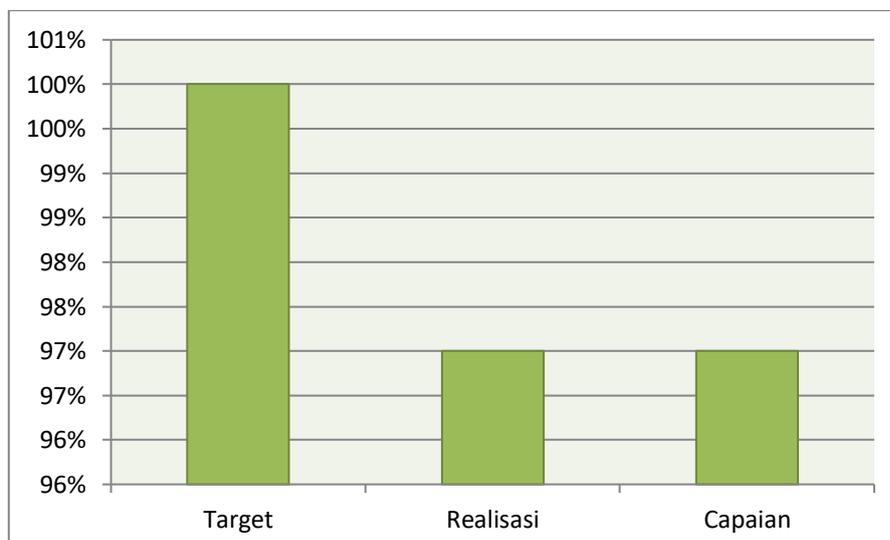
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Tercapainya seluruh Target kinerja ini didukung oleh komitmen penuh dari pejabat dan seluruh komponen yang turut andil dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang menyangkut Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah.

Sasaran 3 : Meningkatnya peran aktif PSKS dan kelembagaan sosial dalam penanganan PMKS

Indikator	2016	2017		Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	
Persentase PSKS dan Kelembagaan Sosial yang aktif	100%	100%	97%	97%
Rata-rata Capaian				

Grafik



Permasalahan/Hambatan

Tidak tercapainya seluruh target pada indikator ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada pertengahan tahun 2017.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Harus meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi antara Badan dan Dinas terkait Perencanaan dan Anggaran untuk tahun berikutnya.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Sosial Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 23.038.259.372 atau 91,50% dari pagu sebesar Rp. 25.178.433.354 Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran 2 yaitu sebesar Rp. 7.374.841.748 Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran 1 yaitu 1.319.117.100. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2017 sebagai berikut:

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas jaminan dan perlindungan sosial PMKS	94%	1.566.932.520	1.319.117.100	84%
Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS	98%	8.100.247.736	7.374.841.748	96%
Meningkatnya peran aktif PSKS dan kelembagaan sosial dalam penanganan PMKS	71%	3.142.967.800	2.809.845.360	89%

D. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas jaminan dan perlindungan sosial PMKS	94%	84%	16%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS	98%	90%	10%
4	Meningkatnya peran aktif PSKS dan kelembagaan sosial dalam penanganan PMKS	71%	89%	11%

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Sosial telah mencapai sembilan puluh persen capaian indikator kinerjanya. Yaitu dari 4 indikator kinerja ada 3 Indikator kinerja yang pencapaiannya di atas 90% dan 1 Indikiator yang capaiannya hanya 71%. Rendahnya capaian pada indikator 4 terjadi karena adanya Rasionaliasasi Anggaran pada pertengahan tahun 2017, sehingga terdapat satu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan SDM PSKS tidak dapat dilaksanakan.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Sosial antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial Namun demikian, untuk tahun 2018, Dinas Sosial tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur
2. Melakukan revisi Renstra
3. Tetap menganggarkan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target dengan melakukan koordinasi lintas sektoral
4. Meningkatkan kualitas mitra Dinas Sosial kabupaten Bengkalis.
5. Melakukan koordinasi dengan konsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi Riau dan Kementrian Sosial Republik Indonesia
6. Meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan PSKS sehingga kebijakan yang direncanakan tepat sasaran

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Tugas dan Fungsi.....	4
D. Struktur Organisasi	5
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	7
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	9
A. Pengukuran Kinerja	9
B. Analisis Kinerja	9
C. Realisasi Anggaran	14
D. Analisis Efisiensi.....	14
Bab IV Penutup	15